

BAB II

INSTITUT PELANGI PEREMPUAN (IPP) SEBAGAI ORGANISASI PRO LGBT

Organisasi pendukung atau pro LGBT saat ini mulai banyak bermunculan seiring dengan semakin berkembangnya isu seputar LGBT. Organisasi-organisasi tersebut berusaha untuk melakukan berbagai hal demi mewujudkan tujuan mereka yaitu menuntut adanya kesetaraan bagi kaum LGBT. Sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 propinsi di Indonesia.¹ *Pertama*, Jaringan Gay, Waria, dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain Indonesia (GWLINA) yang didirikan pada Februari 2007. *Kedua*, Forum LGBTIQ Indonesia yang didirikan pada 2008.

Jaringan ini bertujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender. Salah satu organisasi yang bergabung dalam jaringan ini adalah Institut Pelangi Perempuan (IPP).

A. Profil Institut Pelangi Perempuan (IPP)²

Institut Pelangi Perempuan merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2006. Organisasi ini menjadi pusat kegiatan dan informasi bagi kelompok perempuan LBT (lesbian, biseksual, perempuan, dan transgender female to male) muda di Indonesia. Salah satu strategi dalam IPP adalah memberdayakan perempuan LBT muda Indonesia untuk dapat memperjuangkan hak-hak seksualitas lesbian guna mewujudkan tatanan masyarakat demokratis yang tidak diskriminatif

¹ *Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia?* Yang diakses melalui m.republika.co.id. Diakses pada 23 Agustus 2017. Pada pukul 16.00 WIB.

² *Institut Pelangi Perempuan* yang diakses melalui www.pelangiperempuan.or.id/profil/. Diakses pada 23 Agustus 2017. Pukul 17.30 WIB.

terhadap perbedaan seksualitas. Organisasi ini memiliki motto *Edufuntainment (Education, Fun and entertainment)*. IPP mendapatkan \$5000 dari Urgent Action Fund untuk membantu dalam hal pelatihan pertahanan bagi para anggota.³

1. Visi dan Misi Institut Pelangi Perempuan (IPP)⁴

- Memberdayakan potensi dan sumber daya kelompok perempuan LBT muda sehingga terbangun kesadaran kritis untuk memperjuangkan hak-hak seksualitas perempuan LBT muda.
- Melakukan proses pemberian pemahaman kepada publik mengenai wacana seksualitas perempuan LBT muda.
- Memperjuangkan hak seksualitas minoritas perempuan LBT muda menuju tatanan masyarakat demokratis yang tidak diskriminatif terhadap preferensi seksual berbeda.

2. Program- program IPP⁵

a) Anak Pelangi Club

Merupakan sebuah kelompok seni dan budaya LGBT muda yang melakukan pertunjukan tarian, operet, drag king, drag queen dan lain-lain sebagai upaya kampanye HAM LGBT. Kelompok ini dimulai pada tahun 2010 dan telah menampilkan berbagai pertunjukan di berbagai wilayah di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Sampai saat ini para anggota Anak Pelangi Club telah melakukan beberapa pertunjukan dan juga sempat mendukung perayaan *Internasional Day Against Homophobia* tahun 2012 di Jakarta.

³ #GIVE2COURAGE: KAMILIA MANAF, yang diakses melalui <https://urgentactionfund.org>. Diakses pada 23 Agustus 2017 pada pukul 18.00 WIB.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

b) Kongkow Lez

Kongkow Les merupakan kegiatan reguler tiap bulan pemutaran film dan diskusi santai untuk LBT muda yang diadakan IPP sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Kegiatan ini berupa pemutaran film mengenai isu lesbian dan kemudian dijadikan bahan diskusi bagi komunitas LBT muda. Narasumber dari kegiatan Kongkow Lez adalah para feminis, aktivis HAM, tokoh agama, penulis dan lain-lain sesuai dengan topik yang dipilih.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ruang aman dan nyaman bagi komunitas LBT muda untuk saling berbagi pengalaman dan permasalahan keseharian mereka. Kegiatan ini telah berjalan selama 5 tahun dengan kota Jakarta sebagai tempat diadakannya Kongkow Lez, meskipun demikian banyak kaum LBT muda dari wilayah lain yang hadir, seperti Bandung, Jogja, Semarang bahkan dari Timor Leste. Catatan hasil dari Kongkow Lez kemudian dibukukan oleh IPP.

c) Erotics Indonesia

Merupakan sebuah jaringan dan penelitian tentang hak internet dan seksualitas yang dikoordinasi IPP yang bekerjasama dengan *Association for Progressive Communication* (APC) yang merilis global projectnya Erotics. Jaringan internet ini dapat dilihat di www.eroticsindonesia.net. Pada bulan Mei 2011, IPP menemukan beberapa *internet service provider* di Indonesia yang telah memblokir beberapa situs LGBT seperti ILGA dan IGLHRC.

Kemudian pada Juli 2012, IPP bekerjasama dengan APC mengadakan workshop erotics Indonesia yang mengundang beberapa organisasi hak seksual seperti kelompok pekerja seks, LGBT, perempuan

positif HIV/AIDS dan lain-lain. Dalam workshop ini dijelaskan tentang hak internet dikaitkan dengan isu seksualitas serta keamanan digital bagi para pesertanya.

Pada November 2012, Erotics Indonesia bekerjasama dengan beberapa kelompok LGBT membawa isu perempuan dan LGBT dalam *Indonesia Internet Governance Forum 2012* sebagai salah satu upaya advokasi akan hak internet dan seksualitas di Indonesia.

d) Lez School

Lez School adalah program kusus singkat mengenai gender, seksualitas, feminisme, kepemimpinan perempuan dan lain-lain. Program ini sudah ada sejak tahun 2009. Fasilitator yang menjadi mentor dalam program ini adalah para feminis atau aktivis HAM, akademisi, para LBT muda dan lain-lain. Dengan metode pengajaran *youth friendly* setiap peserta diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan kreatif selama kelas berlangsung. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi juga ada program kunjungan yang berkaitan dengan materi yang diberikan.

B. Peran Institut Pelangi Perempuan (IPP) untuk LGBT di Indonesia: Studi Kasus *Queering* Tata Kelola Internet di Indonesia dan Internet Sebagai Media Strategis Bagi Promosi Penegakan HAM LGBT

Penerimaan masyarakat Indonesia akan adanya kelompok berorientasi homoseksual atau yang dikenal sebagai gay dan lesbian masih sangat kontroversial. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan adat istiadat yang masih terjaga dan islam sebagai agama mayoritas. Homoseksual bertentangan dengan nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan bab1 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Isi dari undang-undang ini menjadi dasar bahwa tidak akan ada perkawinan sejenis di Indonesia yang disahkan secara agama dan hukum. Namun, dalam kenyataanya saat ini praktik LGBT telah marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Kaum LGBT di Indonesia sangat sulit berkembang karena adanya penolakan dari masyarakat. Mereka juga sering mengalami diskriminasi karena dianggap berbeda dan melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, mulai bermunculanlah berbagai organisasi baik yang pro dan kontra terhadap isu ini. Semakin terbukanya seksualitas di ranag publik membawa dampak positif dan negatif yang diperluas dengan adanya jairngan internet. Disatu sisi, intenet telah menjadi ruang bagi kemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak hak para LGBT. Di sisi lain intenet menjadi ruang untuk memperburuk dan melanggengkan diskriminasi terhadap kaum LGBT, yang sebelumnya telah terjadi di ruang fisik. Hal ini akibat belum adanya perlindungan HAM LGBTIQ dalam tata kelola internet.⁶

Pelecehan yang bersifat *homophobic bullying* dan hasutan kebencian terhadap kaum LGBTIQdi dunia internet atau dikenal sebagai *cyber homophobic* seperti menjadi kebiasaan di jejaring sosial dan media lainnya. Belum lagi sejak tahun 2011 berbagai kasus pemblokiran situs LGBTIQ oleh beberapa *Internet Sevice Provider* (ISP) atau penyedia layanan internet. Pemblokiran terjadi secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik web dan tanpa alasan yang jelas.

⁶ Kamila Manaf, Dewi Nova Wahyuni, dkk, *Queering Tata Kelola Internet di Indonesia*. Institut Pelangi Perempuan, Jakarta, hlm. iv.

Pemblokiran dan pemutusan akses terhadap informasi situs LGBTIQ ini tanpa melalui proses komunikasi yang transparan dari pihak ISP ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI). Hal ini merugikan individu atau kelompok yang ingin mengakses informasi mengenai hak asasi manusia maupun hak seksualitas.⁷

1. Media Komunikasi yang Aman Untuk Pengorganisasian LGBTIQ

Bagi kaum LGBT mengungkapkan identitas gender, orientasi seksual dan hal lainnya tidak semudah dengan masyarakat pada umumnya (heteroseksual). Hal ini dikarenakan belum adanya pengakuan dari negara pada identitas gender dan orientasi seks mereka. Lemahnya perlindungan hukum pada diskriminasi juga sikap masyarakat yang inteprestasi praktik beragama juga masih tinggi di Indonesia. Institut Pelangi Indonesia (IPP) yang berbasis di Jakarta menggunakan teknologi informatika dan komunikasi TIK sebagai alat pengorganisasian komunitas.

Pada tahun 2005, IPP hanyalah sebuah perkumpulan para lesbian muda yang sering kongkow bareng dan berbagi pengalaman antara yang lainnya. Tingginya tingkat diskriminasi pada kaum LGBT pada saat itu memaksa kaum ini untuk bertemu di ruang-ruang sempit (tidak secara terbuka). Sehingga, media merupakan tempat yang aman untuk mengembangkan pikiran mereka. IPP mulai mengorganisir komunitas LBT menggunakan *mailing list group*. Kelompok inilah yang kemudian menjadi salah satu media komunitas untuk muncul sebagai gerakan sosial LBT muda Indonesia.⁸

Pada tahun 2006, salah satu anggota dari kelompok tersebut yang memiliki keahlian seputar teknologi informasi berinisiatif untuk mengubah *mailing list group*

⁷ *Ibid*

⁸ Kamila Manaf, Dewi Nova Wahyuni, dkk, *Queering Tata Kelola Internet di Indonesia*. Institut Pelangi Perempuan. *Op.Cit.* hal..20.

tersebut menjadi sebuah forum diskusi dalam situs www.satupelangi.com. Kemudian pada tahun 2007 forum diskusi tersebut meluaskan fungsinya menjadi situs web organisasi www.pelangiperempuan.or.id. Didalam situs ini mempublikasikan artikel-artikel, e-book, dan majalah digital mengenai hak asasi LBT muda serta karya tulis kreatif berupa puisi dan cerpen karya LBT muda. Dalam situs ini juga masih terdapat fitur diskusi disebuah ruang didalam kolom kontak yang memberi ruang komunikasi antara penggerak IPP dan komunitas LBT muda. Kolom kontak ini sering dikunjungi untuk kebutuhan berjejaring, berkonsultasi, bergabung dalam kegiatan komunitas, dan menjadi anggota sukarelawan IPP.

2. Internet sebagai Media Edukasi dan Advokasi yang Aman⁹

Pemberitaan pada media-media utama yang sering diskriminatif terhadap komunitas LGBT di Indonesi mendorong IPP untuk menerbitkan media independen yang bersumber pada suara komunitas LGBT. Mulai tahun 2007, IPP mempublikasikan media dalam bentuk digital seperti majalah dan komik, buku elektronik. Hal tersebut dilakukan IPP untuk menciptakan media yang menyuarakan LGBT dan aman untuk diakses anggota komunitas.

Pilihan media digital ini adalah sebagai jawaban dari IPP untuk menciptakan kebutuhan akan rasa aman anggota komunitas. Beberapa anggota komunitas merasa takut apabila harus membawa media cetak. Ketakutan tersebut biasanya berupa sebuah pertanyaan yang akan muncul mengenai orientasi seksual dan identitas gender apabila mereka ketahuan membawa media cetak mengenai komunitas LGBT. Berawal dari ketakutan tersebut yang membuat IPP untuk membentuk publikasi digital yang dapat diakses di internet atau dikemas dalam CD

⁹ *Ibid.* Hal. 22.

yang dikemas secara taktis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyamarkan konten dari media tersebut. Dengan cara itu, komunitas LGBT merasa memiliki privasi dan keamanan mereka terjaga selama mengakses informasi terkait LGBT.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa hak atas informasi harus berbarengan dengan hak privasi dan rasa aman bagi kaum LGBT. Publikasi digital juga membantu dalam konteks edukasi dan advokasi dari tingkat nasional hingga tingkat internasional. Pada tahun 2010, IPP menerbitkan sebuah komik bernama *Komik Yogyakarta Principles* dalam versi bahasa Indonesia. Setahun kemudian atau tepatnya tahun 2011, komik tersebut diterbitkan dalam bahasa Inggris. Komik ini merupakan kumpulan dari kisah-kisah nyata kaum LBT muda di Jakarta yang dikemas dalam bentuk fiksi dan kemudian dianalisa menggunakan *Yogyakarta Principles*. Penerbitan dan publikasi *Komik Yogyakarta Principles* ini bertujuan untuk mempermudah kaum LGBT dalam memahami bahasa hukum dan HAM dari *Yogyakarta Principles*. Pemilihan media komik juga untuk menjaga hak privasi dan rasa aman para responden yang menjadi narasumber pencatatan kasus kekerasan tersebut.

3. Pemblokiran Website LGBTIQ oleh Swasta dan Negara¹⁰

Inteprestasi homoseksual sebagai pornografi pada UU pornografi berdampak pada pemblokiran website LGBTIQ. Seorang aktivis LGBTIQ melapor kepada IPP bahwa ia tidak dapat mengakses tautan komik *Yogyakarta Principle* terbitan IPP yang dipublikasi di website *International LGBTI Association (ILGA)* di www.ilga.org pada April 2011. Pemblokiran juga dilakukan pada situs www.iglhcr.org yang merupakan web milik *International LGBTIQ Human Rights*

¹⁰ *Ibid. Hal. 31.*

Commission (IGLHCR). Terdapat tiga ISP Indonesia yang melakukan pemblokiran terhadap website LGBTIQ, yakni Telkomsel Flash, IM2 Indosat dan Lin tasarta terhitung sejak bulan Mei 2011.

Pemblokiran juga terjadi pada bulan Juli 2013 di situs www.ourvoice.org (yang saat ini diganti dengan www.suarakita.org). Jika mengakses situs www.ourvoice.org menggunakan *provider* XL maka akan keluar keterangan seperti berikut :

“Pelanggan yang terhormat, sesuai dengan peraturan perundangan situs tujuan anda tidak dapat diakses. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan. Silahkan mencoba kembali.” Dibawahnya terdapat kalimat *“AKSES DITUTUP”* tertanda DEPKOMINFO.

4. *Cyber-homophobic* Terhadap Kaum LGBTIQ oleh Individu Maupun Organisasi Masyarakat.¹¹

Menurut Sekretaris jenderal PBB, Ban Ki-moon, *homophobic bullying* adalah kebiadaban moral, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan krisis kesehatan masyarakat. Ketika seorang LGBT mengekspresikan identitas gender dan orientasi seksual mereka di dunia daring mereka sering mengalami *cyber homophobic*. *cyber homophobic* atau *homophobic bullying* serta kebencian terhadap identitas gender dan orientasi seksual *nonheteronormatif* di internet semakin umum terjadi. Berdasarkan data dari *United Nations Education Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), *homophobic bullying* merupakan kasus *bullying* terbesar kedua di seluruh dunia.

¹¹ *Ibid.* Hal. 33

Kaum LGBT sering mendapatkan komentar intimidatif bahkan sampai ancaman pembunuhan. Ancaman melalui media juga sering berpengaruh buruk terhadap psikologi para aktivis HAM LGBTIQ. Hal serupa juga disampaikan oleh *Asociation for Progesive Communication* (APC) melalui peluncuran EROTICS. Duabelas responden mengatakan bahwa mereka mengalami intimidasi ketika berbicara mengenai seksualitas seperti tentang LGBTIQ, penderita HIV/AIDS, kebebasan beragama dan tentang kesehatan reproduksi.

Cyber homophobic juga telah menjadi kebiasaan di sebuah forum internet Indonesia salah satunya situs bernama Kaskus. Kaskus didirikan di Amerika Serikat mulai tahun 1999 oleh dua orang Indonesia di Seattle, AS. Situs ini memiliki lebih dari 4,5 juta pengguna terdaftar. Para pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja dan orang dewasa yang tinggal di Indonesia bahkan di luar Indonesia dengan jumlah *page view* melebihi 150.000.000 setiap hari. Para anggota Kaskus sering menyebut istilah “maho” atau manusia homo untuk meledek atau melakukan guyonan dan berkomentar untuk hal-hal yang dianggap tidak layak dan baik. Istilah “maho” memiliki arti abnormal, jelek, aneh, cacat dan sakit.

Cyber homophobic juga dilakukan oleh individu melalui media sosial lainnya bahkan pada tahun 2014 seorang politisi yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk wilayah DKI Jakarta mengkampanyekan homophobia dalam situs media sosial (Twitter) pribadi miliknya.

